

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah (otoda) dan desentralisasi fiskal. Masalah otoda semakin mendapat perhatian sejak lahirnya kepemimpinan Abdurrachman Wahid dan kabinet persatuan Nasional, khususnya dengan dibentuknya Kementerian Negara Urusan otoda, yang kemudian dihapus dan disatukan menjadi Departemen Dalam Negeri.(suparmoko: 2002)

Otoda adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya berdasarkan atas aspirasi dari masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah itu sendiri. Dengan dibentuknya otoda diharapkan setiap daerah mampu meningkatkan pendapatan dari potensi yang ada, memberikan kemandirian untuk bisa berkembang sendiri tanpa ketergantungan kepada dana yang bersumber dari Pemerintah pusat atau APBN. Dalam pelaksanaan otoda peranan Pemerintah Daerah sangatlah krusial dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah dituntut untuk selalu berada dalam garda terdepan untuk pembangunan daerahnya. Namun, Pemerintah pusat tidak lepas tangan terhadap daerah. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah pusat dalam menanggulangi ketimpangan pendapatan antara daerah yang satu dengan

daerah yang lain misalnya dengan pengalokasian dana perimbangan kepada tiap daerah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang ada.

Setiap daerah pasti menyusun APBD yang kemudian akan menghasilkan laporan dari aktivitas daerah yang berpengaruh terhadap belanja yang telah ditetapkan dalam APBD, dan laporan tersebut akan dituangkan pada laporan-laporan keuangan daerah seperti, laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam pendapatan daerah. Dana alokasi umum adalah komponen terbesar dalam dana perimbangan. Peningkatan dana perimbangan merupakan konsekuensi logis otonomi daerah yang disertai pendanaanya dengan kebijakan desentralisasi fiskal melalui UU no. 25 tahun 1999 tentang dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang kemudian diganti dengan UU no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pungutan dan pengelolannya merupakan kewenangan pemerintah daerah

Dalam Permendagri 59 tahun 2007 perubahan dari Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 26 dijelaskan bahwa kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam PAD maupun dana perimbangan.

Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dijelaskan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dana perimbangan dan pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber penting bagi keberlangsungan suatu Daerah. Maka dari itu pengalokasiannya perlu untuk diperhatikan. Pemerintah harus lebih pandai dalam memilih dan memilih program mana yang perlu untuk didahulukan untuk didanai dan diprogramkan dalam APBD serta yang tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Kesejahteraan dan pembangunan Daerah perlu untuk menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah karena itu merupakan tujuan utama dari digalakkannya otonomi Daerah. Pemerintah harus memperhatikan penggunaannya secara cermat agar tercapai suatu kesinambungan dan kenyamanan semua pihak. Hal ini mendorong peneliti melakukan penelitian yaitu **“Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah realisasi pendapatan daerah terhadap belanja daerah?
2. Bagaimanakah peran Dana Perimbangan terhadap belanja daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pamekasan.
2. Seberapa besar pengaruh dana perimbangan terhadap belanja di kabupaten pamekasan

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi instansi pemerintah

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan realisasi pendapatan dan belanja Di Kabupaten Pamekasan.

2. Bagi Akademik

Menjadi Refrensi tambahan dan perluasan pengetahuan bagi pihak Universitas Trunojoyo.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan Tambahan ilmu dalam memahami realisasi pendapatan dan belanja Di Kabupaten Pamekasan.

1.5. Lokasi dan waktu penelitian

penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Pamekasan, Jl. Stadion no A 58 pamekasan.